



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2024

**Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta**

2024

Jl. Kenanga No.26, Maguwoharjo, Depok,
Sleman Yogyakarta

    BKIPM Yogyakarta

 www.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmyogyakarta

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Yogyakarta , 30 Juni 2024
Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta

Muchmad Taufiq Trisnajaya, SE
NIP.198209012005021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	11
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	12
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	13
F. Pengungkapan Penting Lainnya	14
VI. Lampiran dan Daftar	15

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA**

*Jalan Kenanga No 26 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
TELEPON (0274) 439390, FAXIMILE (0274) 439390*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Yogyakarta , 30 Juni 2024
Plt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta


Muchmad Taufiq Trisnajaya



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta Per 30 Juni 2024 ini telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.26.385.000,- atau mencapai 22 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.120.000.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.2.280.541.361,- atau mencapai 45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 224.889.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.8.743.024.046,- terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.142.718.826, Aset Tetap (neto) sebesar Rp.8.743.024.046,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 8.816.016.196,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 263.354.713,- dan 8.743.024.046,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus / deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.98.250.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.2.410.040.571,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(9.021.373.696). Surplus Kegiatan Non

Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(2.383.655.571)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.9.265.571.715,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(9.019.903.696) ditambah dengan koreksi senilai Rp.,00 dan Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0 Koreksi Aset Tetap/ Non Revaluasi Rp.0 Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.8.548.166.817,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 8.793.834.836,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAIN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	120,000,000	99,720,000	83.10	249,567,973
JUMLAH PENDAPATAN		120,000,000	156,615,000	130.51	249,567,973
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2,102,214,000	1,606,381,185	76.41	4,558,662,429
Belanja Barang	B.4	2,943,491,000	674,160,176	22.90	2,788,229,706
Belanja Modal	B.5		-	91.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		5,045,705,000	2,280,541,361	45.20	7,346,892,135

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMAN HASIL
PERIKANAN YOGYAKARTA
NERACA
PER 30 Juni 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120,000,000	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar di Muka(prepaid)	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.9	-	-
Persediaan	C.10	22,718,826	31,304,683
Jumlah Aset Lancar		142,718,826	31,304,683
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5,693,266,000	5,693,266,000
Peralatan dan Mesin	C.15	6,459,325,022	6,415,313,522
Gedung dan Bangunan	C.16	2,624,428,000	2,624,428,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	9,980,000	9,980,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	49,467,000	49,467,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6,236,160,802)	(6,236,160,802)
Jumlah Aset Tetap		8,743,024,046	8,631,609,903
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	968,000	968,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(968,000)	(968,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		8,885,742,872	8,662,914,586
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	120,000,000	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	91,960,254	21,147,149
Utang yang belum ditagihkan	C.26	51,394,459	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		263,354,713	21,147,149
JUMLAH KEWAJIBAN		263,354,713	21,147,149
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	8,479,669,333	9,265,571,715
JUMLAH EKUITAS		8,479,669,333	9,265,571,715
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,743,024,046	9,286,718,864

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAIN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**
(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	26,385,000	46,325,000
JUMLAH PENDAPATAN		26,385,000	46,325,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,686,761,439	2,658,117,240
Beban Persediaan	D.3	25,635,020	44,474,904
Beban Barang dan Jasa	D.4	516,172,647	1,018,012,671
Beban Pemeliharaan	D.5	63,273,682	74,208,410
Beban Perjalanan Dinas	D.6	118,197,783	295,109,328
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	202,634,697
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2,410,040,571	4,292,557,250
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,383,655,571)	(4,246,232,250)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus /Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,383,655,571)	(4,246,232,250)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,383,655,571)	(4,246,232,250)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	8,609,428,543	9,265,571,715
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,383,655,571)	(4,246,232,250)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2,253,896,361	3,804,950,614
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(129,759,210)	(441,281,636)
EKUITAS AKHIR	E.5	8,479,669,333	8,824,290,798

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta

Dasar Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Hukum Perikanan Yogyakarta sebagai salah satu upaya pemerintah
Entitas dan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Rencana Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan
Strategis Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.
2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Entitas berkedudukan di Jalan Kenanga No 26 Maguwoharjo
Depok Sleman Yogyakarta. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta mempunyai
tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan
implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada
Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut
diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada
akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan
dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta
berkomitmen dengan :

Visi “Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya.

Misi “Mewujudkan Produk perikanan yang berdaya saing melalui
penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

“Mewujudkan pengolahan Sumberdaya Kelautan & Perikanan yang
berkelanjutan melalui pengendalian Hama penyakit ikan Karantina
(HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang & dibatasi .

“Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang
sejahtera, maju, mandiri, melalui pola Konsumsi Ikan Yang
Bermutu serta budidaya ikan yang jelas bebas dari Hama &

Penyakit ikan .

Mengacu pada tugas, fungsi pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta **Yakni :**

Tugas Pokok

Melaksanakan pencegahan masuk & tersebarnya hama penyakit ikan karantina (HPIK) Ke/Di/Keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ,serta penerapan system manajemen mutu baik dipintu masuk/ keluar wilayah administrative Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Indonesia
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nyadari HPI dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan tujuan.
3. Pelaksanaan tindakan Karantina terhadap media pembawa media pembawa HPIK .
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan.
6. Pelaksanaan Inspeksi terhadap unit pengolahan ikan dalam rangka Sertifikat penerapan program Manajemen Mutu
7. Pelaksanaan Surveilans HPIK ,Mutu dan keamanan hasil perikanan
8. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan ,Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Pelaksanaan pengujian HPIK , Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

10. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu pada Laboratorium pelayanan operasional.

11. Pembantu Koreksi Media Pembawa dan/atau HPIK

12. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Perkarantina Ikan Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kebijakan Mutu Dan Aturan Kantor Untuk Pengguna Jasa Dan Pihak Ketiga :

Menjamin Kesehatan ikan ,Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Adalah suatu kebijakan Otoritas kompeten Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dengan Keteladanan, Kebersamaan ,Dedikasi, Kerja Keras dan Disiplin,Berdasarkan Kaidah Profesionalisme.

1. Memastikan Pemenuhan Persyaratan untuk kepuasan pelanggan.
2. Menjamin Pengendalian Sistem Manajemen Kerja
3. Meningkatkan Dan Mengedepankan Kinerja disemua Lini secara berkelanjutan .

Kerjasama maupun Mou kepada pihak ketiga baik mitra/Bank Persepsi/ stake holders antara lain :

- Kerjasama dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk
- Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta memiliki SDM yang berjumlah 54 Orang yang terdiri dari :

- PNS : 17 Orang
- Pnpnpn : 5 Orang
- Outsourcing : 9 Orang

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing .

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPIM Yogyakarta adalah sebagai berikut

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

-
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN Khusus pengeluaran melalui bendahara Pengeluaran , pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan .

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Perperalatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik) Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	120,000,000	249,567,973
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	120,000,000	249,567,973
Belanja		
Belanja Pegawai	2,102,214,000	1,606,381,185
Belanja Barang	2,943,491,000	674,160
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	5,045,705,000	1,607,055,345

Realisasi

Pendapatan

Rp.26.385.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.26.385.000,- atau mencapai 22 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000.000,-. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Jasa.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	120,000,000	26,385,000	21.99
Pendapatan Lain-lain	-	-	-

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2024 sebesar Rp.26.385.000,- dari Estimasi Pendapatan Sebesar Rp. 120.000.000,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	26.385.000	46,325,000	0.00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah	26,385,000	46,325,000	0.57

Realisasi

Belanja Negara

Rp.2.280.541.361

, -

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 2.280.541.361,- atau 45 % dari anggaran belanja sebesar Rp.5.045.705.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Periode 30 Juni 2024 mengalami Penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Tahun sebelumnya hal ini disebabkan antara lain

1. Adanya beberapa Mutasi pegawai , Kenaikan gaji berkala adanya beberapa pegawai kenaikan pembayaran Tunjangan kinerja

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,102,214,000	1,606,381,185	76.41
Belanja Barang	2,943,491,000	674,160,176	22.90
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5,045,705,000	2,280,541,361	45.20
Pengembalian	-	-	-

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,606,381,185	2,491,194,139	99.41
Belanja Barang	674,160,176	1,346,295,975	94.07
Belanja Modal	-	-	99.84
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2,280,541,361	3,837,490,114	97.54

Belanja Pegawai B.3 Belanja Pegawai

Rp.

1.606.381.185,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.606.381.185,- dan Rp 2.491.194.139,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	919,777,141	2,527,470,494	(63.61)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	681,731,383	1,982,793,204	(65.62)
Belanja Lembur	4,873,000	132,312,300	(96.32)
Jumlah Belanja Kotor	1,606,381,524	4,642,575,998	(65.40)
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	1,606,381,524	4,642,575,998	(65.40)

Belanja

Barang

Rp.2.943.491.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.943.491,- dan Rp. 2.491.194.139,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan (47) dari Realisasi Belanja Barang TA 2023

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15,920,050	734,187,250	(97.83)
Belanja Barang Non Operasional	0	223,090,461	(100.00)
Belanja Jasa	7,200,000	308,389,655	(97.67)
Belanja Pemeliharaan	54,766,682	611,632,849	(91.05)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	260,541,507	246,895,311	5.53
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	437,510,232	728,665,574	(39.96)
Jumlah Belanja Kotor	775,938,471	2,852,861,100	(72.80)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	775,938,471	2,852,861,100	(72.80)

Belanja

Modal Rp.0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00,-, dan Rp.1.346.295.975,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Moda TA 2023 Hal ini disebabkan

karena adanya pemotongan anggaran .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	311,349,210	(100.00)
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor	0	311,349,210	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	311,349,210	(100.00)

Belanja

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada penambahan aset tanah dikarenakan tidak ada pembelian tanah pada tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Modal

Peralatan & M

esin

Rp. 6.459.325

.022,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp.6.459.325.022,- mengalami kenaikan 48 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp.6.428.433.522,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	6,459,325,022	6,428,433,522	0.48
Jumlah Belanja Kotor	6,459,325,022		0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	6,459,325,022	6,428,433,522	0.48

Belanja

Modal

Gedung &

Bangunan

Rp.

2.624.428.00

0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.624.428.000,- dan Rp.2.624.428.000,- Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak mengalami kenaikan dibandingkan Realisasi TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)
Jumlah Belanja Kotor	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	3,024,218,500	1,431,993,000	(100%)

Belanja

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Modal

jalan, irigasi

dan jaringan

Rp.

9.980.000,-

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9.980.000,- dan Rp.9.980.000,-. Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 tidak mengalami perubahan / nihil.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Belanja Modal Jaringan	9,980,000	9,980,000	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	9,980,000	9,980,000	0.00

Belanja

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Modal

Lainnya Rp.

0,00,-

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00,00,- dan Rp.0,00

Belanja

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan

Sosial

Rp.0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Pada kantor Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya lebih kearah

pengawasan dan pencegahan penyakit karantina maka tidak ada kegiatan ataupun program bantuan sosial

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja bantuan sosial	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.00,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut

:Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai Di Brankas	-	
Uang Di Rekening Bendahara		
Jumlah	-	

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai

dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas bendahara tahun 2023 Rp.0,00 dikarenakan semua penerimaan Negara langsung masuk ke kas Negara dengan menggunakan system MPN-G2 dan tidak menerima uang cash untuk pembayaran jasa karantina ikan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang PNBP
Rp.0,00*

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00. dan Rp.00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang

atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada Tahun 2023 terdapat piutang bukan pajak dikarenakan belum disetornya ke kas negara potongan tunjangan kinerja bulan Desember 2021, dan penyetoran melalui pemotongan spm pada pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari 2020. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
TP/TGR Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.
Rp.0,00 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut;

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2024	TH 2023
	NIHIL		
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar

TPA

Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2024 dan 2023

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1			
2			
3	NIHIL		
4			
5			
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA
2024 dan 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0 **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

**Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0**

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

**Persediaan
Rp.22.718.826,-
,-**

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.22.718.826,- dan Rp.31.304.683

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	22,418,826	36,486,728
Barang untuk Pemeliharaan	300,000	4,636,950
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	7,180,064
Bahan baku	-	16,394,970
Jumlah	22,718,826	64,698,712

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp.0,00

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1			
2			
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4			
5			
6			
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.00,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.5.693.266.000
,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM

Yogyakarta per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.5,693,266,000 dan Rp.5.693.266.000,-. Ada kenaikan nilai tanah pada kantor Stasiun KIPM Yogyakarta. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	5,693,266,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2024	5,693,266,000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

1	1,480	Jl. Kenangan No.26 Maguwoharjo Depok Sleman	5,693,266,000
Jumlah			5,693,266,000

Total aset tanah Stasiun KIPM Yogyakarta 1.480 m².

Peralatan dan

Mesin

Rp.6.459.325.022

,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.6.459.325.022 dan Rp.6.415.313.522,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
PMK 232 Tahun 2022

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta

Saldo Aset Perolehan per 30 Juni 2024	6,459,325,022
Mutasi tambah:	
Hibah Barang	0
Penyitaan barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo Aset per 30 Juni 2024	6,459,325,022
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	6,459,325,022

*Gedung dan
Bangunan
Rp.2.624.428.000
,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp. 2.624.428.000,- dan Rp.2.624.428.000,- Mengalami penyusutan reguler semester I Tahun 2021 dan penyesuaian nilai hasil inventaris asset dari KPKNL Kementerian Keuangan transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Tidak ada transaksi penambahan Gedung dan Bangunan di kantor Stasiun KIPM Yogyakarta.

Jaringan

Rp.9.980.000,-

C.17 Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.980.000, dan Rp.9.980.000,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

30 Juni 2024	9,980,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	9,980,000
Nilai Buku per 30 Juni 2024	9,980,000

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada aset jalan, irigasi dan jaringan.

Aset Tetap

Lainnya

Rp.49.467.000

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.49.467.000,00 dan Rp.49.467.000,00. Aset tetap tersebut berupa monografi, map, maket gedung Stasiun KIPM Yogyakarta.

Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	49,467,000
Mutasi tambah:	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	49,467,000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(6.051.754.509),-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing RP. (6.051.754.509) dan Rp. (5.849.119.812),-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

1	Tanah	5,693,266,000	0	5,693,266,000
2	Peralatan dan Mesin	6,415,313,522	4,971,470,926	1,443,842,596
3	Gedung dan Bangunan	2,624,428,000	280,582,836	2,343,845,164
4	Jaringan	9,980,000	9,319,864	13,173,136
5	Aset Tetap Lainnya	49,467,000	968,000	49,467,000
	Akumulasi Penyusutan	14,792,454,522	5,262,341,626	10,105,729,465

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp.0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2024

Uraian	Nilai Perolehan
NIHIL	NIHIL
Jumlah	

Aset Lain-Lain

C.22 Aset Lain-Lain

Rp.49.467.000,-

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.49.467.000,- dan Rp. 49.467.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:



Saldo per 30 Juni 2024	49,467,000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2024	49,467,000
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	49,467,000

Aset Tetap yang tidak digunakan dijelaskan sebagai berikut:

- Mesin Hitung Elektronik/Calculator
- Numerator
- Perforator

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp*

(6.051.754.509)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.(6.051.754.509),- dan Rp.(5.849.119.812),- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tetap yang tidak digunakan	(6,051,754,509)	968,000	(6,052,722,509)
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	968,000	968,000	0
Jumlah	968,000	968,000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.00,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp.00,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.91.960.254,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.91.960.254, - dan Rp. 22.181.360,-, - Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik	18,817,322	Jurnal balik Desember
Belanja Langganan Internet	2,574,100	untuk Bulan Desember
Belanja Langganan TLP	789,938	untuk Bulan Desember
Total	22,181,360	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima dimuka

Uraian	Jumlah
NIHIL	NIHIL
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA
2024 dan TA 2023*

Uraian	TH 2019	TH 2018
NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp.

8.479.669.333,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.479.669.333,- dan Rp. 8.609.428.543,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp.26.285.000,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.26.285.000,- dan Rp. 46.325.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	26,285,000	46,325,000	(43)
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	26,285,000	46,325,000	(43)

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan sensor karantina ikan mengalami kenaikan di karenakan jumlah pengujian

sampel laboratorium baik lalu lintas maupun non lalu lintas.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp.1.686.761.439,-

,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp **1.686.761.439,-** dan Rp.2.658.117.240,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	958,842,944	2,377,086,346	(60)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	681,731,383	2,024,481,083	(66)
Beban Lembur	4,873,000	157,095,000	0
Jumlah	1,645,447,327	4,558,662,429	(64)

Beban

Persediaan

Rp.25.635.020,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.25.635.020,-, dan Rp.444.474.904,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	96,732,846	95,819,071	
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-		
Bahan Persediaan bahan baku	129,993,975	365,396,325	
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan		0	
Beban Persediaan Lainnya	-		0
Jumlah	226,726,821	461,215,396	(51)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.516.172.647,-
-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.516.172.647- dan Rp.1.018.012.671,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	502,750,941	469,199,350	7.15
Beban penambah daya tahan tubuh	79,092,000	83,497,000	(5.28)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	8,636,100	12,027,800	(28.20)
Beban honor operasional satuan kerja	91,520,000	116,520,000	(21.46)
Beban barang operasional lainnya	58,115,700	52,203,600	11.33
Beban bahan	67,927,102	32,227,528	110.77
Beban honor output kegiatan	15,130,000	5,500,000	175.09
Belanja barang non operasional lainnya	35,487,000	25,500,000	39.16
Beban langganan listrik	201,510,956	204,468,310	(1.45)
Beban langganan telepon	11,410,639	11,177,191	2.09
Beban Langganan Daya & jasa lainnya	82,679,589	91,949,100	(10.08)
Beban sewa	117,236,667	132,416,667	(11.46)
Beban jasa profesi	36,350,000	50,150,000	(27.52)
Beban jasa lainnya	126,415,000	106,563,000	18.63
Beban aset Ekstrakontabel peralatan & Mesin	220,510,100	6,157,000	#####
Jumlah	2,008,827,486	1,559,419,479	28.82

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.118.197.783
,-**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.118.197.783,- dan Rp. 295.109.328,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang menurun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: *Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	362,135,263	288,357,975	25.59
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58,980,000	53,550,000	10.14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,800,000	14,965,600	12.26
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	529,188,143	130,123,806	306.68
Jumlah	967,103,406	486,997,381	98.58

**Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Stasiun KIPM Yogyakarta tidak mempunyai anggaran untuk diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0.00
Jumlah	0	0	0.00

**Beban Bantuan
Sosial Rp.0**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	2023	% NAIK (TURUN)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	0.00
Jumlah	0	0	

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp.202.634.697

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.202.634.697,- dan Rp.453.411.810,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban penyusutan amortisasi	202,634,697	453,411,810	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu

Tertagih Rp.(00) periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00, dan Rp.00,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

**Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.**

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2022

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan Peralatan Dan Mesin	94,107,666		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	94,107,666	0	

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out*

Pos Luar Biasa D.13 Pos Luar Biasa

Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp.8.609.428.543

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.8.609.428.543,- dan Rp. 9.265.571.715,-

Surplus /Defisit

E.2 Surplus (Defisit) LO

LO

Rp.(2.383.655.571)

1)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.(2.383.655.571), dan Rp.(4.246.232.250,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

**Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0**

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
NIHIL	NIHIL
Jumlah	-

**Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0**

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00,- dan Rp.0,00.

**Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.0,-**

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.00,- dan Rp.0,00,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

**Koreksi Lain-
Lain Rp.0**

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri :

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
NIHIL	NIHIL
Jumlah	-

**Transaksi Antar
Entitas**

E.4 Transaksi Antar Entitas

**Rp.2.253.896.361
,-**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.253.896.361,- dan Rp. 3.804.950.614,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan dari Entitas Lain	8,631,773,687
Diterima ke Entitas Lain	99,720,000
Transfer Masuk	16,113,130
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	8,747,606,817

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Diterima dari
Entitas Lain*

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024 DDEL sebesar Rp.25.385.000 sedangkan DKEL sebesar Rp.00

*Transfer masuk /
Transfer keluar
Rp. 925.000,-*

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.925.000,-

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
3	Persediaan		
	Jumlah		-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan
Hibah Langsung
dan
Pengembalian
Rp. 0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 30 juni 2024 adalah Rp.0,00

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL		Rp -
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp.8.479.669.333

, -

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing – masing Rp.8.479.669.333,- dan Rp.8.824.290.079,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

NIHIL.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Persediaan senilai Rp. 22.718.826 didukung dengan BA Stock Opname
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp.120.000.000,- dan BA Kas Opname dan LPJ Bendahara pengeluaran
3. Persediaan senilai Rp.82.025.735 sudah didukung dengan BA Stock Opname
4. Terdapat utang yang belum ditagihkan senilai Rp.



Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
PMK 232 Tahun 2022

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta

51.394.459,-

.